

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PENYELENGGARA  
PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM MENERAPKAN  
DOKUMEN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI**

**Studi Kasus Pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan**

**Sulawesi Tengah**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Hukum



**Oleh:**

**Guruh Mahardhika**

**NIM 2220119002**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Dr. Khairani, S.H.,M.H.**
- 2. Dr. Muhammad Hasbi, S.H.,M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PENYELENGGARA  
PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM MENERAPKAN DOKUMEN  
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI**

**Studi Kasus Pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan  
Sulawesi Tengah**

(Guruh Mahardhika, NIM 2220119002, Program Studi Magister Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum Universitas Andalas)

**ABSTRAK**

Keberadaan Dokumen RKK sangat penting dalam pekerjaan konstruksi. Dokumen ini menjadi salah satu persyaratan teknis yang dinilai dan dikompetisikan pada saat pemilihan jasa konstruksi. Penyedia Jasa yang berkontrak dengan Pengguna Jasa wajib menerapkan Dokumen RKK. Namun demikian, tidak semua klausul dalam Dokumen RKK diterapkan oleh Penyedia Jasa ketika melaksanakan pekerjaan. Demi mencapai target selesai tepat waktu, penerapan dan pengawasan Dokumen RKK tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penerapannya, tidak sedikit kesalahan dalam menerapkan Dokumen RKK dilakukan baik oleh Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa. Kesalahan dalam penerapan Dokumen RKK dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja akan membawa dampak negatif bagi pelaksanaan suatu proyek, antara lain keterlambatan dan penambahan biaya. Hal ini membuat peraturan hukum mengenai keselamatan kerja perlu dikaji ulang, terutama aspek pertanggungjawaban hukumnya, meliputi pertanggungjawaban secara Administratif, Perdata, dan Pidana. Penelitian ini membahas penerapan Dokumen RKK pada pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan, dan bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Penyedia Jasa apabila terjadi kecelakaan konstruksi pada proyek tersebut. Studi kasus adalah proyek Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan yang dikerjakan oleh PT. Anugerah Karya Agra Sentosa. Pihak yang menjadi pengguna jasa pada proyek ini adalah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Kementerian PUPR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab hukum dan teori kesadaran hukum. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Sementara bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi aturan hukum keselamatan kerja di bidang konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan, penerapan dokumen RKK pada pekerjaan ini terdapat beberapa ketidaksesuaian. Pertama, Penyedia Jasa terbukti menggunakan tenaga kerja pengganti yang tidak memiliki kompetensi berupa Sertifikat Kompetensi Kerja, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan konstruksi. Kedua, Penyedia Jasa tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur pada saat melakukan penggantian tenaga Ahli Keselamatan Kerja.

**Kata Kunci:** Keselamatan, Pengguna, Penyedia, Jasa, Konstruksi.

**LEGAL RESPONSIBILITY OF PROCUREMENT SERVICE PROVIDER  
AND USERS TO IMPLEMENT OCCUPATIONAL HEALTH AND  
SAFETY DOCUMENTS ON CONSTRUCTION WORKS**

**Case: Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan on Central  
Sulawesi**

(Guruh Mahardhika, NIM 2220119002, Program Studi Magister Ilmu Hukum,  
Faculty of Law University of Andalas)

**ABSTRACT**

The existence of Safety Plans Documents (RKK) is very important in construction work. This document is one of the technical requirements that is assessed and competed for when selecting construction services. Service Providers who have contract with Service Users are required to implement the Safety Plans Document (RKK). However, not all clauses in the Safety Plans Document are applied by the Service Provider when carrying out work. In order to achieve the target of completion on time, the implementation and supervision of the Safety Plans Document did not run as it should. In its implementation, quite a few mistakes in implementing the Safety Plans Document are made by both Service Users and Service Providers. The mistakes on implementing the Safety Plans Document can trigger work accidents. Work accidents will have a negative impact on the implementation of a project, including delays and increased costs. This makes it necessary to review legal regulations regarding work safety, especially aspects of legal responsibility, including administrative, civil and criminal liability. This research discusses the application of the Safety Plans Document to the “Pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan”, and what the legal responsibility of the Service Provider will be if a construction accident occurs on the project. The case study is “Pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan” carried out by PT. Anugerah Karya Agra Sentosa. The party that is the service user for this project is “BPJN Sulteng” Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The method used in this research is juridical-empirical. The theories used in this research are the theory of legal responsibility and the theory of legal awareness. The data used in this research are primary data and secondary data. Primary data comes from interviews with service users and service providers. Meanwhile, secondary legal material in this research includes work safety legal regulations in the construction sector. The research results show that there are several discrepancies in the application of the RKK document to this work. Firstly, the Service Provider was proven to have used substitute workers who did not have competence in the form of a Work Competency Certificate, which caused construction accidents. Second, the Service Provider does not comply with Standard Operating Procedures when replacing Occupational Safety Experts.

**Keywords:** Safety, Users, Providers, Services, Construction.